

# HASIL DARI PENGECEKAN

## PLAGIASI

LAPORAN MENEGASKAN BAHWA KARYA TERLAMPIR

***Analisis Rasio Keuangan Lembaga Pengguna Anggaran Negara TA  
2016-2017 (studi kasus pada Instansi KBL)***

TELAH DIPERIKSA DENGAN LAYANAN PENCEGAHAN PLAGIARISME  
MY.PLAGRAMME.COM DAN MEMILIKI:

KESAMAAN

**19%**

RISIKO DARI PLAGIARISME

**52%**

PARAFRASE

**3%**

KUTIPAN SALAH

**0%**

Nama file: Karya Ilmiah Latifah Indriani.docx

File telah di periksa 2018-08-16

Laporan dibuat: 2018-08-16

## **ANALISIS RASIO KEUANGAN LEMBAGA PENGGUNA ANGGARAN NEGARA TA 2016-2017 (STUDI KASUS PADA INSTANSI KBL)**

*Latifah Indriani<sup>1)</sup>, Artie Arditha<sup>2)</sup>, Arif Makhsun<sup>3)</sup>*

*<sup>1)</sup>Mahasiswa, <sup>2-3)</sup>Dosen pengajar PS Akuntansi*

*Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung Jalan Soekarno-Hatta  
No.1, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp. (0721) 787309*

### **RINGKASAN**

Tujuan penulisan tugas akhir ini untuk mengetahui kinerja keuangan Instansi KBL dalam mengelola dan menyalurkan anggaran yang dianalisis dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun anggaran 2016-2017. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio keuangan terhadap anggaran yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas. Sumber data berupa data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Data sekunder berupa anggaran instansi dan realisasi anggaran tersebut. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keefektifan Instansi KBL dalam mengelola anggarannya pada tahun anggaran 2016-2017 termasuk dalam kategori sangat efektif, sedangkan dari sisi efisiensi Instansi KBL berada pada kategori tidak efisien pada tahun 2016 dan 2017. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2016 dan 2017 realisasi belanja yang telah dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan memiliki besaran nilai yang jauh berbeda dengan realisasi pendapatan yang telah diterima. Bila dilihat dari rasio aktivitas, kinerja Instansi KBL menunjukkan kategori kurang baik. Hal ini disebabkan karena instansi belum mampu memprioritaskan dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia, diberlakukannya sistem desentralisasi membuat pemerintah baik pusat maupun daerah harus mengadakan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja instansi pemerintah dalam mengelola keuangannya secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Kemampuan instansi pemerintah dalam mengelola keuangan dapat dilihat dari anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, yang mencerminkan kemampuan entitas tersebut dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran pemerintah dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat agar terjamin secara layak. Anggaran pemerintah merupakan kerangka kerja terperinci sebagai arahan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap anggaran.

Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas instansi pemerintah dalam mengelola sumber daya yang diberikan oleh pemerintah untuk pelayanan publik. Untuk menilai kinerja keuangan instansi pemerintah yaitu salah satunya melakukan analisis laporan keuangan terhadap anggaran

yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Utomo (2011) meneliti tentang Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten Lombok Timur dan Pramono (2014) meneliti tentang Kinerja Keuangan Kota Surakarta menggunakan Analisis Rasio Keuangan Terhadap Anggaran..

Beberapa rasio keuangan yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (Halim, 2012). Instansi KBL sebagai salah satu organisasi sektor publik termasuk dalam instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengambil judul tugas akhir “Analisis Rasio Keuangan Lembaga Pengguna Anggaran Negara TA 2016-2017 (studi kasus pada Instansi KBL).

## **METODE PELAKSANAAN**

Bahan yang digunakan berupa data laporan keuangan instansi yaitu Laporan Realisasi Anggaran Instansi KBL sebagai

instansi pemerintah untuk periode tahun anggaran 2016 dan 2017. Bahan tersebut diolah dengan bantuan alat komputer menggunakan *MS Excel*.

Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan menggunakan data sekunder. Sujawerni (2014) berpendapat bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan, buku, majalah, dan lain sebagainya. Data sekunder yang diperoleh penulis adalah data gambaran umum instansi, struktur organisasi instansi, dan laporan realisasi anggaran untuk periode tahun anggaran 2016 dan 2017.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif. Sugiyono (2006) berpendapat bahwa kuantitatif merupakan proses penelitian yang menggunakan data penelitian berupa angka-angka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai tolak ukur penilaian kinerja. Alat analisis kinerja keuangan yang digunakan yaitu Rasio Keuangan Terhadap APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Adapun prosedur analisisnya sebagai berikut:

1. Menghitung Rasio Efektivitas.
2. Menghitung Rasio Efisiensi.
3. Menghitung Rasio Aktivitas.

4. Membandingkan masing-masing rasio untuk tahun anggaran 2016 dan 2017.
5. Menilai kinerja keuangan berdasarkan kriteria rasio keuangan yang diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Menghitung Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 6. Perhitungan Rasio Efektivitas

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Rasio Efektivitas (%)
2016	Rp22.000.000,00	Rp29.410.430,00	133,68
2017	Rp15.000.000,00	Rp26.774.273,00	178,50

Sumber: Data Sekunder diolah (2018) LRA

Berdasarkan tabel 6, maka didapat hasil rasio efektivitas untuk tahun 2016 dan 2017 masing-masing menunjukkan persentase 133,68% dan 178,50%.

### 2. Menghitung Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 7. Perhitungan Rasio Efisiensi

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efisiensi (%)
2016	4.307.920.275,00	29.410.430,00	1464759,36
2017	3.459.640.928,00	26.774.273,00	1292151,21

Sumber: Data Sekunder diolah (2018) LRA

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi pada tabel 7, maka didapat hasil untuk tahun 2016 dan 2017 masing-masing menunjukkan persentase 1464759,36% dan 1292151,21%.

### 3. Menghitung Rasio Aktivitas

#### a) Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 8. Perhitungan Rasio Belanja Operasi

Tahun	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2016	4.294.517.875,00	4.307.920.275,00	99,69
2017	3.434.301.928,00	3.459.640.928,00	99,27

Sumber: Data Sekunder diolah (2018) LRA

Berdasarkan tabel 8, maka didapat hasil rasio belanja operasi untuk tahun 2016 dan 2017 masing-masing yaitu menunjukkan persentase 99,69% dan 99,27%.

#### b) Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 9. Perhitungan Rasio Belanja Modal

Tahun	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2016	13.402.400,00	4.307.920.275,00	0,31
2017	25.339.000,00	3.459.640.928,00	0,73

Sumber: Data Sekunder diolah (2018) LRA

Berdasarkan tabel 9, maka didapat hasil rasio efisiensi untuk tahun 2016 dan 2017 masing-masing menunjukkan persentase 0,31% dan 0,73%.

### 4. Perbandingan Rasio

Dari hasil perhitungan rasio keuangan terhadap APBN yang telah dilakukan di atas, maka perbandingan rasio selama tahun 2016-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Perbandingan Rasio Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (dalam %)

Jenis Rasio	Tahun Anggaran		Kenaikan (Penurunan)
	2016 (%)	2017 (%)	
1. Rasio Efektivitas	133,68	178,5	44,81
2. Rasio Efisiensi	1464759,36	1292151,21	-172608,15
3. Rasio Aktivitas:			
a. Rasio Belanja Operasi	99,69	99,27	-0,42
b. Rasio Belanja Modal	0,31	0,73	0,42

Berdasarkan perhitungan perbandingan rasio pada tabel 10 di atas menggambarkan kenaikan atau penurunan rasio untuk masing-masing jenis rasio pada tahun 2016 dan 2017.

Rasio efektivitas terdapat kenaikan sebesar 44,81% dari 133,68% pada tahun 2016 kemudian menjadi 178,50% pada tahun 2017. Rasio efisiensi terdapat penurunan sebesar 172608,15% dari 1464759,36% di tahun 2016 lalu menurun menjadi 1292151,21% pada tahun 2017. Rasio aktivitas mengalami penurunan -0,42% untuk rasio belanja operasi dari 99,69% di tahun 2016 menjadi 99,27% pada tahun 2017, sedangkan untuk rasio belanja modal mengalami kenaikan 0,42% yaitu dari 0,31% pada tahun 2016 menjadi 0,73% pada tahun 2017.

### 5. Penilaian Kinerja Keuangan

Penilaian kinerja keuangan Instansi KBL untuk tahun anggaran 2016 dan 2017 yang dinilai dari tingkat kriteria keuangan berdasarkan rasio keuangan dan telah dihitung pada tabel 6, 7, 8, dan 9 adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Penilaian Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2016 dan 2017 Berdasarkan Kriteria Rasio Keuangan (dalam %)

Jenis Rasio	Tahun Anggaran		Kriteria	
	2016	2017	2016	2017
1. Rasio Efektivitas	133,68	178,5	Sangat Efektif	Sangat Efektif
2. Rasio Efisiensi	1464759,36	1292151,21	Tidak Efisien	Tidak Efisien
3. Rasio Aktivitas:				
a. Rasio Belanja Operasi	99,69	99,27	Kurang Baik	Kurang Baik
b. Rasio Belanja Modal	0,31	0,73	Kurang Baik	Kurang Baik

Tabel 11 di atas menggambarkan penilaian kinerja keuangan Instansi KBL untuk tahun anggaran 2016 dan 2017 yang dinilai berdasarkan kriteria rasio. Rasio efektivitas Instansi KBL pada tahun 2016 mencapai 133,68% dan 2017 mencapai 178,50%. Berdasarkan kriteria untuk rasio efektivitas, kinerja Instansi KBL dalam mengelola APBN untuk tahun anggaran 2016 dan 2017 termasuk sangat efektif, karena rasio efektivitas pada kedua periode tersebut mencapai lebih dari 100%. Hal ini terlihat pada kemampuan instansi dalam merealisasikan pendapatan yang telah dianggarkan, kemudian dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Rasio efektivitas Instansi KBL juga mengalami peningkatan sebesar 44,81% dari 133,68% pada tahun 2016 kemudian mencapai rasio 178,50% pada tahun 2017. Peningkatan rasio ini juga menunjukkan bahwa Instansi KBL dapat dikatakan memiliki kinerja yang sangat baik dalam meningkatkan pendapatan.

Untuk rasio efisiensi Instansi KBL pada tahun 2016 mencapai 1464759,36% sedangkan untuk tahun 2017 mencapai rasio 1292151,21%. Berdasarkan kriteria rasio efisiensi, pada tahun 2016 dan 2017 dikategorikan sebagai tidak efisien karena lebih dari 100%. Hal itu

disebabkan karena besarnya realisasi belanja pada kedua periode tersebut sangat besar jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diperoleh selama kedua periode tersebut. Terjadinya penurunan rasio efisiensi dari tahun 2016-2017 sebesar 172608,15% menjelaskan bahwa terdapat sedikit peningkatan dalam keefisienan kinerja keuangan Instansi KBL. Hal ini disebabkan pada tahun 2017 besarnya realisasi belanja sedikit berkurang dari realisasi belanja pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 dan 2017 kemampuan instansi dalam meminimalkan belanja negara untuk memperoleh pendapatan tidak efisien.

Rasio aktivitas terdiri dari bagian rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Rasio belanja operasi Instansi KBL pada tahun 2016 mencapai rasio 99,69% dan pada tahun 2017 mencapai rasio 99,27%. Hal ini menunjukkan bahwa rasio belanja operasi Instansi KBL berdasarkan kriteria rasio dikategorikan kurang baik karena pada kedua periode tersebut rasio belanja operasi mencapai lebih dari 80%. Hal itu disebabkan oleh perbandingan total belanja operasi dengan total belanja yang memiliki nilai hampir sama pada kedua periode tersebut.

Kemudian untuk rasio belanja modal Instansi KBL pada tahun 2016 mencapai 0,31%

sedangkan pada tahun 2017 mencapai 0,73%. Berdasarkan kriteria rasio belanja modal, Instansi KBL pada tahun 2016-2017 termasuk pada kriteria kurang baik karena kedua periode tersebut memperoleh rasio belanja modal tidak lebih dari 10%. Hal ini disebabkan karena perbandingan total belanja modal dengan total belanja memiliki perbedaan yang cukup besar pada kedua periode tersebut. Dari rasio belanja operasi dan belanja modal tersebut menunjukkan bahwa rasio aktivitas Instansi KBL kurang baik, karena instansi belum mampu memprioritaskan dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat diketahui kinerja keuangan Instansi KBL yang dinilai berdasarkan analisis rasio keuangan menggunakan rasio keuangan terhadap APBN untuk tahun anggaran 2016 dan 2017 mengalami penurunan. Kinerja keuangan Instansi KBL untuk tahun 2016 dan 2017 dinilai baik pada aspek efektivitas. Efektivitas Instansi KBL dalam mengelola APBN mencapai kriteria sangat efektif dan

mengalami peningkatan sebesar 44,81%, yaitu dari 133,68% (2016) meningkat menjadi 178,50% (2017).

Kinerja keuangan Instansi KBL untuk tahun 2016 dan 2017 dinilai masih belum baik pada aspek efisiensi dan aktivitas. Efisiensi Instansi KBL dalam mengelola APBN dikategorikan tidak efisien karena mencapai rasio lebih dari 100% yaitu 1464759,36% (2016) dan 1292151,21% (2017). Instansi KBL dalam menggunakan dananya masih belum berimbang, karena sebagian besar APBN masih digunakan untuk belanja operasional yaitu sebesar 99,69% (2016) dan 99,27% (2017). Di samping itu, rasio belanja modal terhadap APBN juga masih rendah yaitu sebesar 0,31% (2016) dan 0,73% (2017).

## SARAN

Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan rasio efektivitas yang mencapai kriteria sangat efektif, maka Instansi KBL agar tetap mempertahankan dan meningkatkan keefektifan dalam mengelola dan menyalurkan APBN setiap tahunnya.
2. Instansi KBL agar lebih meminimalisir pengeluaran belanja yang dikeluarkan

untuk memperoleh pendapatan sehingga efisiensi instansi meningkat dalam mengelola dan menyalurkan APBN.

3. Instansi KBL agar lebih proporsional di dalam mengalokasikan belanjanya, yaitu mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Pramono, Joko. 2014. Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta). STIE AMA. Salatiga. Vol.7 No.13. (2014)
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Sujarweni, V. 2014. Metodologi Penelitian. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Utomo, Danang Prio. 2011. Analisa Rasio Keuangan APBD Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja pada Pemda Kabupaten Lombok Timur TA 2007-2009. STKIP Hamzanwadi Selong. Lombok. *Jurnal Educatio*. Vol 6 No.2 (2011)



